

## INTISARI

Salah satu alat pengendalian pembangunan yang digunakan dalam manajemen lahan adalah *subdivision regulation/control* yang bertujuan untuk mengatur standar minimal pembangunan dan fasilitas yang harus dibangun dalam lokasi lahan tersebut. Implementasi alat tersebut dapat dilakukan melalui *regulatory system* dimana sudah ada aturan baku yang harus langsung dipakai sebagai standar diterbitkan atau tidaknya izin, disampaikan pada masyarakat melalui *advice planning*, sebagaimana yang diterapkan di Banyuwangi. Dalam prakteknya, *advice planning* mengarah pada *regulatory system*, yang keberhasilannya tergantung pada sisi peraturan dan penerapan secara hukumnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur efektivitas implementasi *advice planning* di perkotaan Banyuwangi serta mengetahui urutan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *advice planning* tersebut dilihat dari konteks implementasi kebijakan publik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif dengan metode penelitian *mix method concurrent embedded quanqual*. Penelitian ini bersifat deskriptif asosiatif dengan pengumpulan data melalui survey primer dan sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan analisis korelasi.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa rendahnya efektivitas implementasi *advice planning* di perkotaan Banyuwangi dikarenakan kurangnya implementasi komponen *advice planning*, terutama aspek ketentuan teknis peruntukan ruang. Implementasi kebijakan publik dalam pelaksanaan *advice planning* kurang tercapai karena dari 6 (enam) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yang digunakan, hanya faktor komitmen yang telah tercapai. Uji hubungan variabel bebas dan terikat pada regresi linear dan korelasi membuktikan bahwa terdapat hubungan antara efektivitas implementasi *advice planning* dengan pencapaian faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Adapun efektivitas implementasi *advice planning* paling dipengaruhi oleh faktor partisipasi, dengan adanya faktor lainnya, yaitu faktor ekonomi pemohon, hubungan personal pemohon dan petugas/pimpinan, dan komitmen terhadap lingkungan hidup berkelanjutan.

**Kata Kunci :** *Advice planning*, efektivitas, pengendalian pemanfaatan lahan, perkotaan Banyuwangi, *regulatory system* dalam penataan ruang

## ABSTRACT

One of the development control tools used in land management is subdivision regulation / control which aims to regulate the minimum standards for development and facilities that must be built in the location of the land. The implementation of this tool can be done through the regulatory system where there are standard rules that must be directly used as a standard whether a permit is issued or not, conveyed to the public through advice planning, as implemented in Banyuwangi. In practice, advice planning leads to the regulatory system, the success of which depends on the regulation and its legal application.

The purpose of this study was to assess advice planning's level of implementation effectiveness in urban Banyuwangi and determine the order of factors that affect the implementation effectiveness of advice planning seen in the context of the implementation of public policy. The approach used in this research is deductive method with a mix of research methods concurrent embedded quauqual. This research is a descriptive associative with data collection through primary and secondary surveys. Analysis of the data used is multiple linear regression analysis and correlation analysis.

Based on the results of the study, found out that low level of advice planning's implementation effectiveness in Banyuwangi due to the lack of implementation of the advice planning component, mainly technical aspects of the terms spatial allocation. The implementation of public policy in the implementation of the advice planning less achieved because of the six principles of public policy are used, only the principle of commitment has been achieved. Test linear regression and correlation relationships proved that there is a relation between the level of advice planning's implementation effectiveness and achievement of the implementation of public policy's principle. The level of advice planning's implementation effectiveness most influenced by the principles of participation, communication, and ability, with the presence of other factors, called applicant's economic factors, personal relationship between the applicant and the officer, also commitment to sustainable living environment.

**Keywords : Advice planning, effectiveness, land use control, Banyuwangi urban area, regulatory system in spatial planning**